



Peningkatan Kapasitas Staf Yayasan Sapda Tentang Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan Dan Pelecehan Seksual-Pseah (*Preventif Sexual Exploitation, Abuse And Harassment*)

Andrie Irawan¹, Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo²

^{1,2}Universitas Surakarta

e-mail: andrie.ir@gmail.com¹, iyo210795@gmail.com²

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

This paper discusses the importance of policies on Prevention of Exploitation, Violence, and Sexual Harassment (PSEAH) in protecting individuals from the negative impacts of such behaviors. Community engagement programs aim to raise awareness, develop policies, enhance the capacity of officials, provide support for victims, and establish effective reporting systems. SAPDA Foundation has a PSEAH policy and a commitment to creating a safe and comfortable work environment with zero tolerance for PSEAH. They conduct Capacity Building to improve staff understanding and knowledge of the policy through various steps. The outcomes of Capacity Building are expected to increase awareness, skills, organizational culture, trust, compliance, and reduce risks and losses. Recommendations include clear policy formulation, regular training, awareness promotion, special team development, routine assessments, expert consultations, victim support, and promotion of a zero-tolerance culture. Additionally, Komnas Perempuan launched CATAHU 2022 in response to the rise in Gender-Based Violence (GBV) cases in 2021, urging the immediate enactment of the TPKS Bill. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection also has the SIMFONI-PPA program to address violence against women and children.

Keywords: PSEAH Policy, Gender Equality and Human Rights, Capacity Building for PSEAH

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pentingnya kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) dalam melindungi individu dari dampak negatif perilaku tersebut. Program keterlibatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan kebijakan, meningkatkan kapasitas pejabat, memberikan dukungan bagi korban, dan membangun sistem pelaporan yang efektif. SAPDA Foundation memiliki kebijakan PSEAH dan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman tanpa toleransi terhadap PSEAH. Mereka melakukan Peningkatan Kapasitas untuk meningkatkan pemahaman

dan pengetahuan staf terhadap kebijakan melalui berbagai langkah seperti sosialisasi, distribusi materi pendidikan, pelatihan dasar dan lanjutan, penguatan kapasitas tim penegakan hukum, dan pemilihan mata pelajaran pendampingan. Rekomendasinya mencakup perumusan kebijakan yang jelas, pelatihan rutin, peningkatan kesadaran, pengembangan tim khusus, penilaian rutin, konsultasi ahli, dukungan terhadap korban, dan promosi budaya tanpa toleransi. Selain itu, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender (GBV) pada tahun 2021, dan mendesak agar RUU TPKS segera disahkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki program SIMFONI-PPA untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kebijakan PSEAH, Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia, Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (PSEAH) merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi jutaan individu di seluruh dunia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau ekonomi. Bentuk kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang merusak martabat dan hak asasi manusia, serta menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. PSEAH sering kali terjadi dalam konteks di mana terdapat ketimpangan kekuasaan, baik di lingkungan kerja, institusi pendidikan, rumah tangga, maupun situasi darurat seperti konflik dan bencana alam. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi PSEAH tidak dapat diabaikan.

Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) sangat penting karena kasus-kasus PSEAH tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap komunitas dan ekonomi. Dalam banyak kasus, korban PSEAH mengalami kehilangan kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, dan isolasi sosial. Hal ini dapat menghambat produktivitas mereka di tempat kerja dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, PSEAH yang tidak ditangani dengan baik dapat merusak reputasi organisasi dan lembaga, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan perlindungan sosial.

Penerapan kebijakan PSEAH di berbagai negara dipandu oleh sejumlah instrumen hukum internasional yang menetapkan standar perlindungan terhadap kekerasan seksual. Salah satu yang paling menonjol adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang menuntut negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Selain CEDAW, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan berbagai resolusi PBB lainnya juga menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan PSEAH.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warga negaranya dari PSEAH melalui penerapan hukum yang efektif, mekanisme penegakan yang kuat, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban. Kebijakan yang dibuat harus mencakup langkah-langkah preventif, seperti pendidikan dan kampanye kesadaran publik, serta langkah-langkah penanggulangan, termasuk sistem pelaporan yang mudah diakses dan responsif, perlindungan hukum bagi korban, dan rehabilitasi pelaku. Di banyak negara, penegakan hukum yang lemah dan budaya impunitas masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan PSEAH. Oleh karena itu, reformasi hukum dan perbaikan sistem peradilan adalah langkah penting yang harus diambil.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warga negaranya dari PSEAH melalui penerapan hukum yang efektif, mekanisme penegakan yang kuat, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban. Kebijakan yang dibuat harus mencakup langkah-langkah preventif, seperti pendidikan dan kampanye kesadaran publik, serta langkah-langkah penanggulangan, termasuk sistem pelaporan yang mudah diakses dan responsif, perlindungan hukum bagi korban, dan rehabilitasi pelaku. Di banyak negara, penegakan hukum yang lemah dan budaya impunitas masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan PSEAH. Oleh karena itu, reformasi hukum dan perbaikan sistem peradilan adalah langkah penting yang harus diambil.

DI Indonesia sendiri masih marak kasus yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Menurut data Catatan tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum

masa pandemi di tahun 2019.¹ Kemudian bila merujuk pada KEMENPPPA disebutkan bahwa hingga 1 Januari 2024 tercatat terjadi 7661 kasus kekerasan pada Perempuan.²

Berdasarkan hal tersebut Universitas Surakarta menyadari pentingnya peran institusi pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PSEAH. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, Universitas Surakarta melalui program pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan tindakan yang efektif dalam menangani PSEAH. Program ini tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

Program pengabdian masyarakat "Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH)" bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:
2. Mengedukasi masyarakat tentang definisi, bentuk-bentuk, dan dampak PSEAH.
3. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan PSEAH.
4. Mengembangkan Kebijakan dan Regulasi:
5. Membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi yang efektif untuk pencegahan PSEAH.
6. Memberikan rekomendasi berbasis penelitian untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait PSEAH.
7. Peningkatan Kapasitas Aparat:
8. Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pendidik, dan pekerja sosial untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus PSEAH dengan profesional dan sensitif.
9. Dukungan bagi Korban:
10. Membangun jaringan dukungan bagi korban PSEAH, termasuk layanan konseling, bantuan hukum, dan dukungan medis.
11. Membangun Sistem Pelaporan yang Efektif:

¹ Komnas Perempuan, PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022, *Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*, No date, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> diakses pada 1 Juni 2024

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SIMFONI-PPA, 1 Januari 2023 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 1 Juni 2024

12. Mengembangkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan responsif untuk memastikan korban dapat melaporkan insiden PSEAH tanpa rasa takut.

ALASAN MEMILIH DAMPINGAN

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Kebijakan PSEAH yang telah ditetapkan oleh Yayasan SAPDA, maka Yayasan SAPDA memerlukan paparan ahli dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang berprespektif pada kekerasan berbasis gender, dalam hal ini melibatkan penulis untuk menjelaskan dan merumuskan peta jalan kebijakan dimaksud. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan PSEAH dalam lingkup kerja Yayasan SAPDA. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan berlandaskan pada peningkatan pemahaman atas kebijakan PSEAH dalam kerja-kerja di Yayasan SAPDA.

KONDISI SUBJEK DAMPINGAN

Yayasan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) adalah Yayasan yang mempunyai visi “mewujudkan keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia” Untuk mencapai visinya, Yayasan SAPDA menurunkannya dalam Misi organisasi : 1) Melakukan kajian kelimuan dan penelitian ilmiah 2) Memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, difabel dan anak sebagai individu yang bermartabat, dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, manajemen bencana dan jaminan sosial 3) Melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel, dan anak dikalangan masyarakat luas 4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder di indonesia dan luar indonesia berkaitan dengan penanganan inklusi sosial, gender dan disabilitas 5) Membangun sapda sebagai crisis center bagi perempuan, difabel, dan anak 6) Mewujudkan pusat sumber sebagai pusat rujukan inklusi sosial, gender dan disabilitas 7) Menjadi organisasi yang mandiri dan profesional. Sejak tahun 2020 juga, SAPDA merancang kebijakan tentang pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual dalam ruang lingkup kerja Yayasan SAPDA yang biasa disebut dengan PSEAH (Preventif Sexual Exploitation, Abuse and Harrashment).

Yayasan SAPDA sebagai yayasan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan satu kondisi tanpa toleransi (Zero- Tollerance) terhadap eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. SAPDA percaya bahwa semua orang tanpa kecuali berhak hidup bebas dari kekerasan. SAPDA dalam operasional kelembagaan mempunyai dan menyusun kebijakan PSEAH yang setuju oleh pengurus yayasan SAPDA dan selalu dievaluasi setiap tiga tahun. Yang mana kebijakan ini berlaku untuk semua pegiat SAPDA, penerima manfaat dari program-program SAPDA. Kerja- kerja yang dinamis mempunyai konsekuensi atas penambahan dan perubahan sumber daya manusia SAPDA dengan posisi pengurus, managerial, staff , volunteer, konsultan bahkan perubahan mitra-mitra organisasi disabilitas serta organisasi masyarakat yang berkaitan dengan visi dan misi SAPDA. Sumber daya manusia SAPDA yang bergerak dinamis seiring dengan dinamisasi kelompok dampingan serta mitra kerja selain mempunyai keuntungan untuk mendukung kemajuan SAPDA beserta kinerjanya tetapi juga mempunyai risiko terjadinya beragam kekerasan dalam lingkungan kerja, terutama disebabkan oleh keberagaman sumber daya manusia SAPDA baik dari ragam disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, agama serta suku/ latar belakang sosial budaya. Selain itu tekanan pekerjaan sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kualitas pekerjaan dari pemberi dana, pemerintah serta komunitas biasanya menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan baik verbal, fisik, psikis dan yang sangat berat adalah potensi terjadinya kekerasan seksual dilingkungan kerja. Sebagai upaya meminimalisir beragam kekerasan serta dampak dari kekerasan serta memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi mereka yang mengalami kekerasan maka SAPDA menyusun dan mengesahkan kebijakan PSEAH (perlindungan terhadap eksploitasi, kekerasan dan juga pelecehan seksual) yang diterapkan di lembaga SAPDA yang mengikat semua pihak yang bekerja bersama SAPDA baik sebagai pengurus, manajemen, staff, volunteer ataupun konsultan, bahkan komunitas yang bekerja dengan SAPDA. Kebijakan yang telah disusun oleh SAPDA sudah disampaikan kepada semua staff SAPDA tetapi belum sepenuhnya dipahami kenapa harus disusun dan diterapkan dan bagaimana penerapannya dalam kelembagaan karena banyak pihak yang kemudian ragu bahwa kebijakan tersebut akan optimal dijalankan karena akan melukai hubungan personal dalam kelembagaan. Tetapi SAPDA dengan visi dan misinya tetap mempunyai komitmen menjalankan kebijakan PSEAH ini dengan berbagai perangkat dan metode sosialisasi kepada staff. Dalam rangka mewujudkan itu semuanya, maka SAPDA akan melakukan CB dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kebijakan PSEAH. Yang mana kebijakan PSEAH ini sebagai bentuk

peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk menunjang kinerja seluruh staff dan mengoptimalkan SDM yang ada untuk mencapai tujuan visi misi SAPDA yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman dari segala bentuk kekerasan.

METODE

Mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang PSEAH. Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota SAPDA untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kasus PSEAH.

- 1. Edukasi Staf: Melaksanakan sesi sosialisasi untuk seluruh staf mengenai kebijakan PSEAH yang baru, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta prosedur pelaporan.**

Melaksanakan sesi sosialisasi untuk seluruh staf adalah langkah penting dalam mengedukasi dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami kebijakan PSEAH yang baru,

termasuk hak dan kewajiban mereka serta prosedur pelaporan. Berikut adalah langkah-langkah rinci untuk mengimplementasikan sesi sosialisasi tersebut:

- 2. Distribusi Materi Edukasi: Menyediakan materi edukasi seperti pamflet, poster, dan panduan yang menjelaskan kebijakan PSEAH dengan jelas dan ringkas.**

Menyediakan materi edukasi yang jelas dan ringkas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh staf Yayasan SAPDA memahami kebijakan PSEAH. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendistribusikan materi edukasi secara efektif:

- 3. Pelatihan Dasar PSEAH: Mengadakan pelatihan dasar untuk semua staf tentang apa itu PSEAH, bagaimana mengenalinya, dan cara melaporkannya.**

Pelatihan dasar tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) merupakan langkah esensial dalam memastikan bahwa seluruh staf memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu ini, dapat mengenalinya, dan tahu bagaimana melaporkannya.

- 4. Pelatihan Lanjutan: Menyediakan pelatihan lanjutan bagi manajer dan tim HR tentang penanganan laporan PSEAH, investigasi, dan mendukung korban.**

Pelatihan lanjutan bagi manajer dan tim HR adalah langkah penting dalam memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani laporan PSEAH dengan profesionalisme, keadilan, dan empati.

5. Penguatan Kapasitas Tim Penegakan: Melatih tim khusus yang akan bertugas menangani dan menginvestigasi laporan PSEAH, memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan.

Penguatan kapasitas tim khusus yang bertugas menangani dan menginvestigasi laporan PSEAH adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap laporan diperlakukan dengan serius dan diproses dengan cepat serta adil.

6. Pemilihan Subjek Dampungan

Target peserta Capacity Building Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) di lingkup ruang kerja Yayasan SAPDA meliputi:

Seluruh Staf Termasuk staf administrasi, staf program, staf lapangan, dan staf manajerial. Mengingat bahwa isu PSEAH dapat memengaruhi siapa pun di dalam organisasi, pelatihan ini penting bagi semua anggota tim untuk memastikan pemahaman yang holistik dan responsive serta Manajer dan Supervisor yang memiliki peran penting dalam menegakkan kebijakan, mendukung staf, dan menangani laporan PSEAH. Pelatihan khusus untuk mereka akan membantu memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola situasi PSEAH dengan efektif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelatihan Capacity Building ini, Yayasan SAPDA dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana setiap individu memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu PSEAH dan siap untuk bertindak secara proaktif dalam pencegahan dan penanganannya.

HASIL DAN DISKUSI

Outcome dari Capacity Building Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) di lingkup ruang kerja Yayasan SAPDA dapat mencakup:

1. Peningkatan Kesadaran: Para peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual serta dampaknya terhadap individu dan organisasi. Mereka juga akan lebih

sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam mencegah dan menangani kasus-kasus PSEAH.

2. Penguatan Kapasitas: Para peserta akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali, melaporkan, dan menangani kasus-kasus PSEAH secara efektif. Ini termasuk pemahaman tentang prosedur pelaporan yang jelas, keterampilan investigasi, dan kemampuan untuk memberikan dukungan kepada korban.
3. Perubahan Budaya Organisasi: Pelatihan ini dapat membantu mengubah budaya organisasi menjadi lebih responsif dan inklusif terhadap isu-isu PSEAH. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman di seluruh organisasi, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung bagi semua anggotanya.
4. Peningkatan Kepercayaan: Para peserta akan merasa lebih percaya diri dalam melaporkan kasus-kasus PSEAH karena mereka mengetahui bahwa organisasi memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang didukung untuk menangani masalah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan anggota tim dalam berinteraksi di lingkungan kerja.
5. Kepatuhan Terhadap Kebijakan: Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang kebijakan PSEAH, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut di seluruh organisasi. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan adil oleh semua anggota tim.
6. Pengurangan Risiko dan Kerugian: Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang PSEAH dan prosedur yang tepat untuk menanganinya, diharapkan akan terjadi pengurangan risiko dan kerugian bagi organisasi, baik dari segi reputasi maupun secara finansial.
7. Dengan mencapai outcome-outcome ini, Yayasan SAPDA dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, inklusif, dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan
 - a. Edukasi Staf: Melaksanakan sesi sosialisasi untuk seluruh staf mengenai kebijakan PSEAH yang baru, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta prosedur pelaporan.

- b. Distribusi Materi Edukasi: Menyediakan materi edukasi seperti pamflet, poster, dan panduan yang menjelaskan kebijakan PSEAH dengan jelas dan ringkas.
 - c. Pelatihan Dasar PSEAH: Mengadakan pelatihan dasar untuk semua staf tentang apa itu PSEAH, bagaimana mengenalinya, dan cara melaporkannya.
 - d. Pelatihan Lanjutan: Menyediakan pelatihan lanjutan bagi manajer dan tim HR tentang penanganan laporan PSEAH, investigasi, dan mendukung korban.
 - e. Penguatan Kapasitas Tim Penegakan: Melatih tim khusus yang akan bertugas menangani dan menginvestigasi laporan PSEAH, memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan.
2. Saran-Saran
1. terdapat beberapa saran yang dapat diambil dalam Capacity Building Kebijakan tentang Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) di lingkup ruang kerja Yayasan SAPDA:
 2. Penyusunan Kebijakan yang Jelas: Yayasan SAPDA perlu memastikan bahwa kebijakan PSEAH mereka tersusun dengan jelas dan mudah dimengerti oleh semua anggota tim. Kebijakan ini harus mencakup definisi PSEAH, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi pelaku.
 3. Reguler: Adakan pelatihan reguler tentang PSEAH untuk semua staf, baik yang baru maupun yang sudah lama bergabung dengan organisasi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang PSEAH, pengenalan tanda-tanda dan jenis-jenis PSEAH, serta prosedur pelaporan yang tepat.
 4. Promosi Kesadaran: Lakukan promosi secara teratur tentang kebijakan dan prosedur PSEAH melalui berbagai saluran komunikasi internal, seperti email, papan pengumuman, dan rapat staf. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu PSEAH di seluruh organisasi.
 5. Pengembangan Tim Khusus: Bentuklah tim khusus atau komite yang bertugas untuk menangani kasus-kasus PSEAH di dalam organisasi. Tim ini harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kasus-kasus tersebut dengan profesionalisme dan kepekaan.
 6. Penilaian Rutin: Lakukan penilaian rutin terhadap implementasi kebijakan PSEAH dan efektivitas pelatihan yang telah dilakukan. Dengan demikian, Yayasan SAPDA dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan mengambil tindakan yang sesuai.
 7. Konsultasi dengan Ahli: Dapatkan masukan dari ahli atau lembaga yang berpengalaman dalam isu-isu PSEAH untuk membantu menyusun

kebijakan dan pelatihan yang efektif. Mereka dapat memberikan wawasan dan saran yang berharga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

8. Dukungan bagi Korban: Pastikan bahwa ada mekanisme dukungan yang tersedia bagi korban PSEAH, termasuk akses ke konseling dan bantuan hukum. Yayasan SAPDA juga harus memberikan dukungan kepada korban dalam proses pelaporan dan penanganan kasus.

Promosi Budaya Nol Toleransi: Tanamkan budaya nol toleransi terhadap PSEAH di dalam organisasi dengan menekankan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut dan mendukung para korban. Ini harus menjadi nilai inti yang dianut oleh seluruh anggota tim.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Yayasan SAPDA dapat membangun lingkungan kerja yang lebih aman, inklusif, dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

REFERENCES

- Komnas Perempuan, (2022) PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022, Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan, No date, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2023) SIMFONI-PPA, 1 Januari 2023 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>